

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NO. TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA
PAYAKUMBUH
TAHUN 2023**

**DINAS KETAHANAN
PANGAN KOTA
PAYAKUMBUH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan nasional. Dengan demikian program ini memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh. Secara umum tujuan dari ketahanan pangan harus diorientasikan untuk pencapaian pemenuhan hak atas pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan pangan nasional. Berjalannya sistem ketahanan pangan tersebut sangat tergantung pada adanya kebijakan dan kinerja sektor yang terkait dengan program ketahanan pangan.

Kebijakan pemerintah dalam aspek ekonomi, sosial maupun politik sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional dan daerah. Dengan berpedoman kepada rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka disusunlah Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) ini memuat antara lain ; potensi, kondisi saat ini, sasaran, arah kebijakan, program serta rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 serta rencana indikatif perubahan pendanaannya.

Perubahan Renja-PD ini kiranya dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan Ketahanan Pangan ke depan sesuai amanat UU No 18 Tahun 2012, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Payakumbuh, Agustus 2023
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH

EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 20223	8
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN	8
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD	28
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	35
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN PENDANAAN.....	43
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	43
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA	45
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN TH 2023	47
BAB IV PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023.....	20
Tabel 2. Analisis Pencapaian Sasaran 1.....	28
Tabel 3. Analisis Pencapaian Sasaran 2.....	30
Tabel 4. Analisis Pencapaian Sasaran 3.....	34
Tabel 5. Rencana Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023	54

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, di samping mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 juga memperhatikan kebijakan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dan mengakomodir isu-isu strategis lainnya/di bidang ketahanan pangan. Secara khusus, perubahan Renja dilakukan untuk rasionalisasi anggaran dan memenuhi beberapa kebutuhan Dinas yang belum terakomodir didalam DPA awal tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7).
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 04);
26. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 21).
27. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Payakumbuh **Nomor 20 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2022;**

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Renja SKPD

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dimaksudkan untuk :

- a. Memahami dengan lebih baik lingkungan internal dan eksternal Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh sehingga terjadi interaksi aktif dalam pelaksanaan tugas
- b. Menganalisa dan mengkaji secara rinci faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh berdasarkan pemahaman tentang lingkungan internal dan eksternal
- c. Menetapkan kebijakan strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

b. Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023 disusun dengan tujuan :

- a. Mengantisipasi perubahan lingkungan global yang terjadi begitu cepat seperti perkembangan teknologi dan informasi, sementara sumber daya yang tersedia begitu terbatas. Dengan adanya rencana strategis, organisasi dapat mengambil tindakan yang tepat dan cepat sesuai dengan kondisi perubahan yang terjadi.
- b. Memperoleh hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia
- c. Mengetahui orientasi organisasi di masa yang akan datang

- d. Untuk meningkatkan komunikasi di antara anggota organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Bab ini memaparkan tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaiannya terhadap Renstra SKPD, memaparkan tentang analisis kinerja pelayanan SKPD dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

BAB III. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Pendanaan

Bab ini memaparkan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tentang tujuan dan sasaran dari penyusunan Renja, tentang program dan kegiatan yang akan direncanakan dilakukan perubahan pada tahun 2023 berikut dengan kebutuhan dana yang diinginkan.

BAB IV. Penutup

Bab ini memaparkan tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan maupun mengenai ketersediaan anggaran, selain itu juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan dan Capaian Renstra SKPD

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab instansi. Dari empat program yang ditetapkan, semua sedang berjalan, tingkat keberhasilannya belum dapat diwujudkan secara optimal. Perumusan keberhasilan pencapaian jika dibandingkan dengan indikator keberhasilannya dapat terealisasi 37,59 % sampai dengan Triwulan II ini.

Program ,kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada pada Tahun 2023 adalah :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Target Capaian Program : Nilai IKM 85

Kegiatan :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub Kegiatan

a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.019.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.219.200,- atau 76,70%.

b. Evaluasi kinerja perangkat daerah

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.686.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.875.900,- atau 50,43 %.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.142.158.186,- dan terealisasi sebesar Rp. 846.945.033,- atau 39,54%.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 132.991.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 55.289.500,- atau 41,57%.

c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.831.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.322.400,- atau 68,77%.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.357.720,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.689.000,- atau 89,13%.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.613.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.

b. Penyediaan bahan logistic kantor

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.526.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.287.350,- atau 46,48%.

c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.862.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.212.750,- atau 36,25 %.

d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.392.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.836.800,- atau 33,80%.

e. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.425.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.047.500,- atau 30,58%.

f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 126.697.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.010.972,- atau 41,84%.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

a. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.084.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.040.000,- atau 99,84%.

- b. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.144.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 580.000,- atau 4,78%.
6. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Sub Kegiatan
- a. Penyediaan jasa surat menyurat
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.494.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 500.000,- atau 33,46%.
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.122.280,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.321.192,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.011.944,- atau 41,46%.
7. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.190.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.833.000,- atau 27,64%.

- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp.30.130.644,- atau 46,43%.

- c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp.980.000,- atau 14,12%.

B. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

Target Capaian Program :

- % cadangan pangan yang tersedia (masyarakat + Pemda) 51%

Kegiatan :

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai kewenangan daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik

Sub kegiatan ini berupa pembinaan secara berkala (sekali 3 bulan) terhadap PPK revitalisasi Tahun 2023 sebanyak 5 unit

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-,- dan terealisasi sebesar Rp.4.715.320,- atau 47%.

C. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Target Capaian Program :

- % masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE 61%
- Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan 57%

Kegiatan :

1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan

Sub kegiatan ini merupakan alat untuk menyusun kebijakan perencanaan pangan yaitu mengukur ketersediaan energi masyarakat yang ditetapkan secara detil sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein sebesar 63 gr/kap/hari. Selain itu juga menyusun laporan pemantauan harga pangan. Sasaran Sub kegiatan ini melakukan penyusunan buku Neraca Bahan Makanan (NBM) dan buka Pola Pangan Harapan (PPH) dan penyusunan dokumen harga pangan.

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.927.210,- atau 61%.

- b. Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan
Sub Kegiatan ini memantau harga pangan masyarakat sebanyak 365 hari, memantaau stok pangan dan pasokan sebanyak 52 kali. Sasaran Pemanfaatan dan Analisis Akses Harga Pangan Masyarakat memantau harga pada tingkat produsen, pedagang dan konsumen Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.933.364,- dan terealisasi sebesar Rp.12.242.770,- atau 37%.
- c. Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan
Sub Kegiatan ini mengarahkan masyarakat melalui Kelompok Tani (Gapoktan) untuk melaksanakan upaya pemenuhan ketersediaan energi dan ketersediaan protein daya memanfaatkan potensi wilayahnya. Guna mengatasi permasalahan yang dihadapi para petani, Poktan dan Gapoktan terutama di daerah sentra produksi padi maka pemerintah telah melaksanakan Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) yaitu suatu upaya memberdayakan gapoktan dalam usaha distribusi pangan pokok, terutama dalam rangka memperkuat permodalan dan membangun serta mengembangkan prasarana lumbung pangan. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mengembangkan usaha di bidang perdagangan pangan pokok dan anggotanya yang kurang mampu memiliki akses harga pangan pokok.

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp.1.330.000,- atau 22%.

- d. Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia

Sub Kegiatan ini berisi koordinasi dan pembinaan terhadap Toko Tani Indonesia yang ada di Kota Payakumbuh.

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.136.400,- atau 27%.

2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini berisi koordinasi dan rapat-rapat terkait cadangan pangan pemerintah maupun cadangan pangan masyarakat. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 122.499.900,- dan terealisasi sebesar Rp.939.020,- atau 0,77%.

3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita/tahun

Sub kegiatan ini melakukan penghitungan skor PPH Konsumsi yang berdasarkan kepada buku Neraca Bahan Makanan.

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.124.850,- dan terealisasi sebesar Rp.1.827.260,- atau 44,30%.

- b. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis Sumber Daya Lokal

Sub kegiatan ini berupa pelatihan pangan lokal, Sosialisasi konsumsi pangan lokal , Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 181.242.450,- dan terealisasi sebesar Rp.60.648.120,- atau 33,46%.

- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita/tahun

Sub kegiatan ini berisi lomba-lomba yang diikuti oleh Dinas Ketahanan Pangan diantaranya Lomba Ketahanan Pangan (APN), Lomba Peringatan Hari Pangan Sedunia, Lomba Pengolahan pangan lokal non beras non terigu, Lomba cipta menu tingkat kota dan tk provinsi.

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 72.868.650,- dan terealisasi sebesar Rp.511.500,- atau 0,70%.

C. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Target Capaian Program : Skr PPH Ketersediaan 89

Kegiatan :

1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan masyarakat, berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Kemandirian pangan pada intinya adalah pemenuhan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien dan kearifan lokal.

Upaya perwujudan kemandirian dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat miskin dan rawan pangan di pedesaan. Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui jalur ganda/twin track strategy, yaitu : (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di

daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung.

Atas pemikiran tersebut, kegiatan Desa Mandiri Pangan perlu terus didorong dan ditingkatkan pencapaiannya agar Desa yang sudah dibentuk yaitu mulai Tahapan Persiapan, Penumbuhan, pengembangan dan kemandirian dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

Kegiatan ini melatih tim pangan desa dan lembaga keuangan desa dalam upaya memenuhi ketersediaan energi dan ketersediaan protein.

Sasaran kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DMP) : Berkurangnya rumah tangga miskin di desa rawan pangan, terpenuhinya aksesibilitas pangan ditingkat rumah tangga.

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.499.940,- dan terealisasi sebesar Rp.3.405.920,- atau 17,47%.

b. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini berupa pemberian bantuan kepada Keluarga yang memiliki Balita Rawan Gizi (stunting) sebanyak 100 KK.

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp.3.769.450,- atau 6,85%.

D. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.599.750,- dan terealisasi sebesar Rp.30.500.900,- atau 62,76%.

- b. Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.298.200,- dan terealisasi sebesar Rp.24.040.360,- atau 79,35%.

Tabel 1
Evaluasi Pelaksanaan Renja
Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA (RENJA) PD
TAHUN ANGGARAN 2023

TRIWULAN : II

Sasaran	No	Usuran/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026/Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Reaksi Kinerja Pada Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab							
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					
				unit	satuan	Rp	unit	Rp	unit	Rp	unit	Rp	unit	Rp	unit	Rp	unit	Rp	unit	Rp							
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
		DINAS KETAHANAN PANGAN																			DINAS KETAHANAN PANGAN						
	2.09	URUSAN PANGAN			11.450.664.736		3.142.834.890		3.302.223.432	16,99		560.936.307	11,84		391.140.916			28,83		952.077.223		4.094.912.113		35,76			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	86,5	Nilai	10.158.820.818	85,60		2.349.910.810	85		2.690.756.628	0,00		467.980.917	0,00		356.868.636			0,00		824.849.553	85,60	3.174.760.363		31,25
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	85	%	71.251.080	85,00		15.323.460	85		19.706.000	15,00		11.973.100	15,00		542.300			15,00		12.515.400	85	27.838.860		39,07
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12	Dokumen	33.307.960	3,00		6.952.360	3		12.019.850	3,00		8.097.200	3,00		542.300			3,00		8.639.500	6	15.591.860		46,81
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	24	Dokumen	37.943.120	7,00		8.371.100	6		7.686.150	3,00		3.875.900	3,00		-			3,00		3.875.900	10	12.247.000		32,28

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	90	%	8.741.523.664	90	1.855.309.603	90	2.279.980.836	16,99	356.389.739	16,99	322.386.294					16,99	678.776.033	90	2.534.085.636		28,99
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	80	orang	8.628.620.464	23	1.853.123.863	20	2.142.158.186	20	320.489.839	20	321.026.294					20	641.516.133	43	2.494.639.996		28,91
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	dok	104.903.200	-	-	12	132.991.300	3	32.577.500	3	1.360.000					3	33.937.500	3	33.937.500		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	48	Laporan	8.000.000	3	2.185.740	14	4.831.350	3	3.322.400	3	-					3	3.322.400	6	5.508.140		68,85
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	100	%	64.200.000	100	12.195.000	100	15.357.720	100	13.689.000	100	-					100	13.689.000	100	25.884.000		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	72	paket	48.235.760	19	12.195.000	22	15.357.720	22	13.689.000	22	-					22	13.689.000	41	25.884.000		
	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	4	Dokumen	15.964.240	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum sesuai standar	85	%	638.143.632	85	259.078.653	85	162.515.500	15	29.498.576	15	17.027.400					15	46.525.976	85	305.604.629		47,89
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	36	paket	8.261.200	9	1.609.500	9	1.613.150	-	-	-	-					-	-	9	1.609.500		19,48

	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	paket	28.000.000	7	28.635.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7	28.635.000			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	210	paket	55.226.880	61	16.288.600	52	13.526.000	10	5.707.350	10	580.000			10	6.287.350	71	22.575.950	40,88
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	16	paket	32.264.720	3	9.384.120	4	8.862.150	1	60.000	1	1.215.000			1	1.275.000	4	10.659.120	33,04
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	8	paket	34.368.800	2	8.392.200	2	8.392.200	2	2.127.600	2	709.200			2	2.836.800	4	11.229.000	32,67
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	20	laporan	2.600.000	-	-	5	3.425.000	1	699.000	1	200.000			1	899.000	1	899.000	34,58
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	450	laporan	477.422.032	100	194.769.233	100	126.697.000	5	20.904.626	5	14.323.200			5	35.227.826	105	229.997.059	48,17
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase ke tersediaan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	85	%	56.100.000	85	70.466.500	85	39.228.600	15	27.040.000	15	-			15	27.040.000	85	97.506.500	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4	paket	46.100.000	1	1.771.000	1	12.144.600	-	-	-	-			-	-	1	1.771.000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diudakan	4	unit	10.000.000	6	68.695.500	7	27.084.000	7	27.040.000	7	-			7	27.040.000	13	95.735.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah sesuai standar	85	%	127.302.442	85	37.370.434	85	62.937.972	15	10.509.202	15	9.998.142			15	20.507.344	85	57.877.778	45,46

	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	6.000.000	1	1.850.000	1	1.494.500	1	500.000	1	-	1	500.000	2	2.350.000	39,17
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	8 laporan	4.496.000	1	838.062	2	1.122.280	-	-	-	-	-	-	1	838.062	18,64
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	116.806.442	1	34.682.372	1	60.321.192	1	10.009.202	1	9.998.142	1	20.007.344	2	54.689.716	46,82
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85 %	460.300.000	85	100.167.160	85	111.030.000	18	18.881.300	18	6.914.500	18	25.795.800	85	125.962.960	27,37
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	156.760.000	1	29.573.745	1	39.190.000	1	5.220.000	1	1.500.000	1	6.720.000	2	36.293.745	23,15
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	40 Unit	259.600.000	10	63.305.215	10	64.900.000	5	13.661.300	5	4.664.500	5	18.325.800	15	81.631.015	31,44
	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah perakitan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 paket	43.940.000	11	7.288.200	2	6.940.000	-	-	-	750.000	-	750.000	11	8.038.200	18,29

	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan yang tersedia (masy-pemda)	54	%	54.000.000	50,60	-	51	10.000.000	50,60	3.215.320	50,60	960.000				50,60	4.175.320	50,60	4.175.320	7,73
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%cadangan pangan masyarakat	18	%	54.000.000	14	-	15	10.000.000	14	3.215.320	14	960.000				14	4.175.320	14	4.175.320	7,73
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	8	kali	54.000.000	-	-	2	10.000.000	-	3.215.320	-	960.000				-	4.175.320	-	4.175.320	7,73
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	- % masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standart AKE - Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	- 62,5 58,5	%	845.406.862	- 96,3 - 70,65	741.091.040	- 61 - 57	433.069.114	- 96,3 - 70,65	53.547.810	- 96,3 - 70,65	20.351.520				-	73.899.330	- 96,3 - 70,65	814.990.370	96,40
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas dan Pasokan Harga Pangan	- % Pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan - Persentase informasi harga yang up to date	- 19 - 100	%	132.871.630	- 20 - 100	87.434.490	- 16 - 100	52.333.264	- 20 - 100	14.225.790	- 20 - 100	5.386.140				-	19.611.930	- 20 - 100	107.046.420	80,56
	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	- Jumlah laporan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	8	laporan	12.465.148	1	72.295.150	2	12.900.000	1	6.939.210	1	988.000				1	7.927.210	2	80.222.360	643,57
	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Jumlah dokumen pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	10	dokumen	64.639.056	1	5.491.320	1	32.933.364	1	6.060.180	1	4.158.140				1	10.218.320	2	15.709.640	24,30

	Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	8	unit	4.000.000	2	4.782.000	2	5.999.900	1	1.090.000	1	240.000				1	1.330.000	3	6.112.000		
	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani yang dikembangkan	5	lembaga	11.767.426	1	4.866.020	5	500.000	1	136.400	1	-				1	136.400	2	5.002.420		42,51
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	400	keluarga	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	- Persentase cadangan pangan pemerintah sesuai SPM	66	%	70.000.000	62,12	14.627.300	63	122.499.900	62,12	939.020	62,12	-	-	-	-	-	939.020	62,12	15.566.320		22,24
	Persediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota yang diadukan	16	ton	50.000.000	1	14.627.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.627.300		29,25
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota	12	kal	20.000.000	-	-	2	122.499.900	1	939.020	1	-	-	-	-	1	939.020	1	939.020		4,70
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	- persentase masyarakat yang memahami diversifikasi konsumsi pangan - persentase masyarakat yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu	-45 -23	%	642.535.232	-47 -15	639.029.250	-42 -20	258.235.950	-47 -15	38.383.000	-47 -15	14.965.380	-	-	-	-	53.348.380	-47 -15	692.377.630		

	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Jumlah dokumen Target konsumsi pangan per kapita per tahun	4	dok	17.023.600	1	4.063.740	1	4.124.850	1	886.500	1	599.760				1	1.486.260	2	5.550.000	32,60
	Pemberdayaan masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	4	dok	554.000.000	1	626.406.840	1	181.242.450		36.985.000		14.365.620				1	51.350.620	2	677.757.460	122,34
	Koordinasi dan sinkronisasi penentuan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	4	dok	71.511.632	1	8.558.670	1	72.868.650	1	511.500	1	-				1	511.500	2	9.070.170	12,68
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor PPH Ketersediaan	89,30	Nilai	226.972.288	89,02	28.428.900	89	89.499.740	-	6.629.560	-	3.025.000				-	9.654.560	89,02	38.083.460	
	Penanganan Kerawanan Pangan Ke-wenangan Kabupaten/Kota	- Persentase peningkatan hasil pemanfaatan pekarangan	20	%	171.472.288	20	9.865.800	17	74.499.840	-	4.832.370	-	2.343.000				-	7.175.370	20	17.041.170	9,94
	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	8	laporan	8.823.580	1	4.780.500	2	19.499.940	1	1.700.920	1	1.705.000				1	3.405.920	2	8.186.420	92,78
	Pelaksanaan pengisian, pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kab/kota	Jumlah pengisian, pengelolaan, dan pemeliharaan cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	4	dok	162.648.708	1	5.085.300	1	54.999.900	1	3.131.450	1	638.000				1	3.769.450	2	8.854.750	5,44

	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait	50 %	55.500.000	50	18.563.100	50	14.999.900	-	1.797.190	-	682.000							2.479.190	50	21.042.290	37,91	
	Penyusunan , pemutakhiran dan analisis peta kerentanan dan ketahanan pangan	Peta dan analisis Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutakhirkan	4 dokumen	55.500.000	1	18.563.100	1	14.999.900	1	1.797.190	1	682.000							1	2.479.190	2	21.042.290	37,91
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	90,00 %	165.464.768	90	23.404.140	90	78.897.950	3	29.562.700	3	9.935.760							3	39.498.460	90	62.902.600	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase masyarakat yang mengonsumsi zat berbahaya lagi pangan	20 %	165.464.768	15	23.404.140	17	78.897.950	15	29.562.700	15	9.935.760							15	39.498.460	15	62.902.600	38,02
	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	40.000.000	1	15.705.290	1	48.599.750	1	18.424.900	1	9.336.000							1	27.760.900	2	43.466.190	108,67
	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengedaran, pengelakan, dan penyiapan cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	125.464.768	1	7.698.850	1	30.298.200	1	11.137.800	1	599.760							1	11.737.560	2	19.436.410	15,49

Payakumbuh, Juni 2023
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH



EDUDEL ARDA, S. IP
NP.19703124.199003.1.001

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Kantor Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Penilaian akuntabilitas kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator hasil dan indikator keluaran yang merupakan indikator mikro dalam pencapaian sasaran.

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebanyak 4 (empat) sasaran yaitu :

Sasaran 1
Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya ketersediaan pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023		%	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	Ketersediaan Pangan	Nilai	19.735 ton	-	-	Pengukuran dilakukan pada Triwulan 4

Sumber : DKP, 2023

Sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dilihat dari indikator : Ketersediaan Pangan

Sasaran meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan dengan indikatornya ini menjadi sangat penting karena tertuang dalam SPM dan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan



SPM Ketahanan Pangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun

2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah.

Indikator keberagaman ketersediaan pangan yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Penyusunan PPH dibuat berdasarkan pertimbangan ukuran pola konsumsi yang dibuat oleh FAO. Susunan PPH memuat 9 (sembilan) kelompok



pangan mulai dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayuran dan buah, biji-bijian dan lemak berminyak, gula serta kelompok lain-lainnya.

Sasaran 2

Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam,
bergizi seimbang dan aman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023		%	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	Skor PPH Konsumsi	Nilai	85,1	87,3	102,58	
2.	Tingkat Keamanan Pangan	Level	Tinggi	Tinggi	100	Sampai Triwulan II

Sumber : DKP, 2023

Sasaran meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu Skor PPH Konsumsi dan Tingkat Keamanan Pangan. Sasaran terjaganya ketersediaan pangan dengan 2 indikatornya ini juga tertuang dalam SPM dan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan.

A. Indikator Pertama yaitu Skor PPH Konsumsi

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan (RPJMN) 2015-2019 ada empat (4) strategi utama :

1. Peningkatan ketersediaan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri.
2. Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.

3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan

Salah satu dari empat (4) arah kebijakan pangan yaitu



perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat telah menjadi indikator yang cukup strategis dan merupakan indikator kinerja dibidang ketahanan pangan yaitu pencapaian skor PPH Konsumsi. Pentingnya

pencapaian skor PPH Konsumsi tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai konsumsi pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Menurut FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH Konsumsi sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari Skor Pangan (dietary score) dan dikenalnya sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang.

Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok : padi-

padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula sayur dan buah. Skor PPH di nilai dengan angka 100. Kegunaan PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan memepertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Apabila terjadi ketergantungan pada jenis pangan tertentu, maka akan mengakibatkan konsumsi total meningkat dan menuntut produksi total yang tinggi pula. Oleh karena itu, jika terjadi sedikit saja gangguan pada ketersediaan pangan tersebut akan berakibat besar pada sistem ketahanan pangan nasional.

Untuk penghitungan data PPH Konsumsi Tahun 2023 berdasarkan data sekunder berasal dari data hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu jenis data sekunder yang digunakan untuk analisis konsumsi pangan. Survey tersebut dilakukan oleh BPS setiap tahunnya yang terdiri dari data Nasional, Provinsi dan Kota. Data yang dikumpulkan merupakan data konsumsi/pengeluaran Rumah Tangga mencakup data makanan dan bahan makanann untuk konsumsi/pengeluaran makanan dikumpulkan data kuantitas dan nilainya sesuai dengan rincian komoditas yang terdapat pada kuisisioner Susenas. Dalam analisis konsumsi pangan, khususnya menggerakan data survey konsumsi pangan, diperlukan data/instrument pendukung antara lain Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) , Daftar Ukuran

Rumah Tangga (URT), Daftar Pangan Acuan, Daftar Konversi Perubahan Bentuk, Daftar Konversi Kode Kelompok Pangan, Daftar Konversi Penyerapan minyak.

B. Indikator kedua adalah Tingkat Keamanan Pangan



Makanan merupakan sumber energi dan sebagai zat gizi untuk mendukung hidup manusia. tetapi makanan juga dapat menjadi wahana bagi unsur pengganggu kesehatan manusia. secara umum bahaya yang timbul dari makanan/minuman sering disebut keracunan makanan. Timbulnya bahaya dapat terjadi melalui unsur mikroorganismenya, kimia atau alami.

Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Dalam upaya mewujudkan sistem jaminan mutu di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan standarisasi melalui Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang “standarisasi Nasional” yang selanjutnya PP dimaksud dijabarkan di sektor pertanian melalui keputusan-keputusan Menteri Pertanian No. 170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional di sektor pertanian. Dalam keputusan ini juga memuat tentang kebijakan sistem jaminan mutu di sektor pertanian.

Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat di Kota Payakumbuh supaya masyarakat terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh bahan-bahan berbahaya, seperti residu pestisida, bakteri, dan formalin. Maka perlu dilaksanakan pengawasan terhadap pangan segar yang beredar di Kota Payakumbuh. Adapun pengawasan dan pengambilan sampel bahan pangan telah dilaksanakan sebanyak 1 kali sebanyak 10 sampel yang terdiri dari uji residu pestisida dan uji formalin.

Sasaran 3
Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023		%	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	Stabilitas Harga					
	* beras	%	10	2,44	175,6	Sampai Triwulan II
	* cabe	%	25	17,30	130,8	Sampai Triwulan II
	* bawang	%	25	9,31	162,36	Sampai Triwulan II
						Sampai Triwulan II
2	Stabilitas Pasokan	%	77	-		Perhitungan pada triwulan IV
	Rata-rata Capaian Kinerja					

Sumber : Data diolah, DKP 2023

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama daerah dan terkait dengan isu strategis nasional sesuai dengan tupoksi Kantor Ketahanan Pangan adalah :

1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Ketahanan pangan pada tataran nasional, merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis keragaman sumberdaya lokal. Terkait definisi tersebut, maka permasalahan ketersediaan dan kerawanan pangan dihadapkan pada :

- a. Produksi dan kapasitas produksi pangan Kota Payakumbuh semakin terbatas, karena:
 - 1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian;
 - 2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan;
 - 3) tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang;
 - 4) masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen (Lossis) pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan pengolahan pasca panen, yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan;
 - 5) tidak terealisasinya harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;

- 6) terbatasnya dukungan permodalan di kelurahan;
 - 7) lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi;
 - 8) masih berlanjutnya pemotongan ternak betina produktif sebagai sumber protein hewani;
 - 9) adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak, sehingga mengganggu upaya peningkatan produktivitas; serta
 - 10) masih terbatasnya manajemen kelembagaan tani
- b. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan berkembangnya penggunaan pangan seiring maraknya perkembangan pariwisata, hotel, dan rumah makan/restoran.
- c. Adanya persaingan penggunaan bahan pangan untuk bio energy dan pakan ternak.
- d. Kerawanan pangan, karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat miskin, dan sering terjadinya bencana alam.
- e. Hasil analisis ketersediaan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program
- f. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastuktur serta kemampuan SDM tenaga pendamping dan penyuluh lapangan.

- g. Penyediaan hasil analisis, peta kerawanan pangan serta hasil kajian
- h. Hasil kajian akses pangan belum ditindaklanjuti dengan kegiatan intervensi sehingga bila terjadi masalah yang berkaitan dengan akses tersebut belum bisa dilakukan upaya pemecahannya secara optimal.
- i. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai instrumen isyarat dini (*early warning system*) pencegahan kerawanan pangan belum optimal dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

2. Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi. Beberapa permasalahan terkait dengan aspek distribusi, yaitu belum memadainya prasarana dan sarana distribusi untuk menghubungkan lokasi produsen dengan konsumen di seluruh wilayah yang menyebabkan kurang terjaminnya kelancaran arus distribusi pangan. Hal ini dapat menghambat akses fisik dan berpotensi memicu kenaikan harga, sehingga dapat menurunkan kualitas konsumsi pangan. Ketidaklancaran proses distribusi juga merugikan produsen, karena di samping biaya pemasaran yang mahal, hasil pertanian merupakan komoditi yang mudah susut dan rusak. Selain itu, ketidakstabilan harga memberatkan petani. Dengan sifat produksi yang musiman, penurunan harga pada saat panen cenderung merugikan petani. Sebaliknya, pada saat tertentu, harga pangan meningkat dan menekan konsumen, tetapi peningkatan harga tersebut tidak banyak dinikmati para petani sebagai produsen.

Permasalahan lainnya adanya pengaruh melonjaknya harga pangan dunia, misalnya beras dan kedelai sebagai akibat kenaikan harga di dalam negeri karena ketergantungan terhadap ekspor pangan. Permasalahan dalam proses distribusi pangan antara lain adalah terbatasnya dan/atau kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi, kondisi iklim yang tidak menentu (akibat kondisi musim hujan yang tidak bersahabat, sehingga banyak jalan yang rusak, karena bencana banjir, atau longsor) yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berdampak terhadap melonjaknya ongkos angkut. Konsekuensi dari ongkos angkut yang tinggi akan berdampak terhadap harga pada tingkat konsumen akan melonjak. Sebaliknya, harga pada tingkat produsen akan jatuh. Tingginya harga pangan mengakibatkan aksesibilitas konsumen secara ekonomi menurun. Maka kondisi ketahanan pangan tentu terganggu.

Lamanya waktu tempuh dalam pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan transportasi, baik karena kondisi infrastruktur jalan maupun cuaca, akan memperbesar persentase bahan pangan yang rusak. Masalah kelangkaan pangan di suatu wilayah berdampak terhadap harga-harga pangan akan melambung sangat tinggi yang berakibat pada terlampauinya tingkat inflasi dari tingkat inflasi yang telah ditetapkan.

Walaupun pemerintah telah menjamin kecukupan stok beras, namun kecukupan stok pangan tersebut tidak dapat menjamin stok pangan di pasar cukup sehingga jika stok di pasar tidak cukup maka akan berdampak terhadap harga pangan di pasar dapat membumbung tinggi.

3. Penganekaragaman, Pola Konsumsi Pangan, dan Keamanan Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, antara lain:

keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga;

- 1) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi;
- 2) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- 3) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima;
- 4) adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum;
- 5) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Sampai saat ini, pembinaan dan sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan Kantor Ketahanan Pangan diakui masih belum optimal, yang ditandai oleh :

- a) keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal;

- b) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
- c) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganeekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media, masih terbatas dan
- d) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya yang membawa penyakit, telah terjadi di berbagai daerah bahkan tergolong sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Kasus-kasus pangan hewani yang terkena wabah penyakit antraks, penyakit flu burung, beredarnya bahan makanan dan minuman olahan tanpa izin edar serta melanggar ketentuan batas kadaluarsa, dan penggunaan bahan tambahan pangan terlarang, dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian.

Hasil pemantuan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, antara lain:

- a) kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar;
- b) belum dipahami dan diterapkannya cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar;
- c) belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida, bahan kimia, dan bahan tambahan pengawet;

- d) masih buruknya praktek-praktek sanitasi dan higiene dalam produksi;
- e) belum adanya ketentuan teknis tentang kewajiban peritel untuk menerapkan Good Ritel Practices (GRP);
- f) masih rendahnya kesadaran para ritel untuk menjual produk segar yang aman dan bermutu;
- g) belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas;
- h) terbatasnya laboratorium yang telah terakreditasi;
- i) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar;
- j) standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanan pangannya masih mudah masuk ke dalam negeri;
- k) belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar;
- l) koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal; dan
- m) kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

4. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan

Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan sebagai aspek non teknis, merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Berbagai permasalahan yang dihadapi perlu ditanggulangi secara terkoordinasi, antara lain:

- a. Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah masih rendah tentang kelembagaan yang menangani ketahanan pangan sebagai Unit Kerja belum seperti yang diinginkan, dan belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya.
- b. Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan yang dibentuk di Provinsi dan kabupaten/kota belum memiliki keseragaman nomenklatur, sehingga penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan belum optimal.
- c. Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah Kota Payakumbuh belum optimal untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan.
- d. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pemerintah daerah belum dilakukan secara berkesinambungan.
- e. Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan kurang optimal sehingga masih perlu ditingkatkan,
- f. Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program,
- g. Tersedianya teknologi komunikasi dan informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program,
- h. Belum terlaksananya kegiatan ketahanan pangan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan.

III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN PENDANAAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan terhadap pembangunan ketahanan pangan di daerah, yang menyatakan bahwa pembangunan ketahanan pangan menjadi program prioritas yang utama. Arah pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada hasil KTT Pangan 2009, yang antara lain menyepakati untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang mendesak pada tingkat nasional, regional dan global untuk merealisasikan secara penuh komitmen *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2000 dan Deklarasi *World Food Summit* (WFS) 1996, untuk mengurangi penduduk dunia yang menderita lapar dan malnutrisi.

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional dan kesepakatan KTT pangan, arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan nasional adalah untuk:

- 1) meningkatkan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan;
- 2) meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga dan cadangan pangan;
- 3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan untuk:

- 1) meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam daerah menuju kemandirian pangan;
- 2) mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis;
- 3) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan penanganan kerawanan pangan.

Dalam aspek peningkatan sistem distribusi, stabilitasi harga dan cadangan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:

- 1) mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan;
- 2) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif;
- 3) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan; dan
- 4) meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan cadangan pangan.

Sedangkan pada aspek peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:

mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal;

mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial;

meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar;

mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan, antara lain:

- a) peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan;
- b) peningkatan kerjasama dengan mitra kerja,
- c) peningkatan pemberdayaan dan peranserta masyarakat;
- d) penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; serta
- e) dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

1. Tujuan

Tujuan dari kegiatan pembangunan ketahanan pangan adalah:

- a) Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat,

protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.

- b) Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau diartikan pangan yang mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau
- c) Mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi lintas pelaku, lintas wilayah dan lintas waktu guna mensinkronkan kebijakan program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan
- d) Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama
- e) Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh wilayah Payakumbuh baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan bencana.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan adalah:

1. Dipertahankannya ketersediaan pangan yang cukup,
2. Terwujudnya distribusi dan stabilitas harga pangan strategis,
3. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan,
4. Mengeliminir kondisi rawan pangan,

5. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi ditandai dengan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras
6. Terwujudnya penurunan konsumsi beras 1 % / tahun
7. Terwujudnya Pola Pangan Harapan (PPH) yang ideal
8. Terwujudnya Program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

3.3. Program dan Kegiatan Yang mengalami Perubahan Tahun 2023

Program dan kegiatan yang direncanakan mengalami perubahan Tahun 2023 adalah :

1. Urusan Pangan

Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan jumlah anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.302.223.432,- yang terdiri dari 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan. Kemudian dalam usulan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp. 3.195.675.284,- atau ada pengurangan sebesar Rp.110,- dengan rincian perubahan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a) Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 12.019.850,- menjadi Rp. 13.056.650,-. dalam anggaran perubahan bertambah

sebesar Rp. 1.036.800,- penambahan disebabkan karena penambahan untuk belanja lembur.

- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 7.686.150,- menjadi Rp. 9.156.000,-. dalam anggaran perubahan bertambah sebesar Rp. 1.469.850,- penambahan disebabkan karena penambahan untuk biaya makan minum rapat.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.142.158.186,- menjadi Rp. 2.017.027.098,-. Pengurangan sebesar Rp. 125.409.088,- karena rasionalisasi anggaran.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran Rp. 132.991.300, menjadi Rp. 130.103.300,- Pengurangan sebesar Rp. 2.888.000,- karena dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian dengan besaran honor pengelola keuangan
- 3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.831.350,- menjadi Rp. 7.441.350 pada anggaran perubahan. Terjadi penambahan Rp. 2.610.000 untuk belanja makan minum rapat dan uang lembur.

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 15.357.720,- menjadi Rp. 13.695.080,-. dalam anggaran perubahan berkurang sebesar Rp. 1.662.640,-. Pengurangan disebabkan karena terdapat pengurangan jumlah paket pembelian , dari 21 stel menjadi 19 stel untuk PDH. Dan dari 21 stel menjadi 18 stel untuk pakaian olahraga.

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 8.862.150,- menjadi Rp. 8.139.150,- . dalam anggaran perubahan berkurang sebesar Rp. 723.000,- pengurangan disebabkan karena pengurangan belanja fotocopy.
- 2) Fasilitasi kunjungan tamu dengan anggaran sebesar Rp. 3.425.000 menjadi Rp. 1.850.000,- berkurang sebesar Rp. 1.575.000,- disebabkan pengurangan fotocopy, belanja cenderamata dari 2 paket menjadi 1 paket serta pengurangan makan minum rapat.
- 3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 126.697.000,- menjadi Rp. 165.868.000,-. dalam perubahan anggaran bertambah sebesar Rp. 39.171.000,-. Penambahan anggaran disebabkan karena memnuhi kebutuhan perjalanan dinas yang masih belum memadai.

e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan mebel dengan anggaran Rp. 0,- . Sub kegiatan ini tidak ada pada DPA awal, dimunculkan pada perubahan ini sebesar Rp. 666.000,- untuk pembelian kursi rapat.
- 2) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran Rp. 27.084.000,- menjadi Rp. 44.289.000,-. dalam perubahan anggaran bertambah sebesar Rp. 17.205.000,- Penambahan anggaran disebabkan karena memnuhi kebutuhan terhadap peralatan dan mesin untuk menunjang pekerjaan kantor yaitu 1 unit laptop/pc

- 3) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 12.144.600 menjadi Rp. 22.627.600,- bertambah Rp. 10.483.000,- untuk pembelian gordena kantor (vertical blind).

f) Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 1.122.280,- menjadi Rp. 0,-. Dalam perubahan anggaran terjadi pengurangan sebesar Rp. 1.122.280,-. Pengurangan anggaran disebabkan karena pembayaran listrik/telepon dan PDAM ditanggung oleh Dinas pusataka dan arsip.
- 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebesar Rp. 60.321.192,- menjadi Rp. 60.227.664,-. Dalam perubahan anggaran terjadi penambahan sebesar Rp. 93.528,-. Penambahan anggaran disebabkan karena penyesuaian besaran asuransi dengan UMR.

g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran Rp. 6.940.000,- menjadi Rp. 5.110.000,-. Dalam anggaran perubahan berkurang sebesar Rp. 1.830.000,-. Pengurangan disebabkan kurangnya biaya pemeliharaan AC.

2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

a) Kegiatan Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kab/Kota

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota anggaran Rp. 122.499.900,- menjadi Rp. 2.667.400,-. Dalam anggaran berkurang sebesar Rp. 119.832.500,-. Pengurangan disebabkan karena pengalihan belanja pengadaan cadangan pangan berupa beras ke sub kegiatan Pengadaan cadangan pangan pemerintah kab/kota serta rasionalisasi.
- 2) Pengadaan cadangan pangan pemerintah kab/kota dengan anggaran sebesar Rp. 0,- menjadi Rp. 77.000.000,-. Dalam anggaran bertambah sebesar Rp. 77.000.000,-. Penambahan disebabkan untuk pembelian pengadaan cadangan pangan berupa beras bulog sebanyak 7 ton.

b) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- 1) Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dengan anggaran Rp. 181.242.450,- menjadi Rp. 182.442.450. dalam perubahan anggaran bertambah sebesar Rp. 1.200.000,-. Penambahan untuk belanja transportasi pembinaan.
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun dengan anggaran Rp. 72.868.650,- menjadi Rp. 61.154.050. dalam perubahan anggaran berkurang sebesar Rp. 11.714.600,-. Pengurangan pada belanja bahan percontohan, belanja

baliho, pengurangan honor juri, sewa alat dapur dan pengurangan uang harian serta transport peserta.

3) Program Penanganan Kerawanan Pangan

a) Kegiatan Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 19.499.940,-. Menjadi Rp. 9.016.940,-. Dalam anggaran perubahan berkurang sebesar Rp. 10.483.000,-. Pengurangan untuk honor Tim Pokja Ahli berikut makan minum rapat.

b) Kegiatan Penyusunan Peta kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

- 1) Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan dengan anggaran sebesar Rp. 14.999.900,-. Menjadi Rp. 15.166.400,-. Dalam anggaran perubahan berkurang sebesar Rp. 166.500,-. Pengurangan untuk dilakukan untuk rasionalisasi anggaran.

4) Program Pengawasan Keamanan Pangan

a) Kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kab/kota

- 1) Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 48.599.750,-. Menjadi Rp. 49.187.450,-. Dalam anggaran perubahan bertambah sebesar Rp. 587.700,-. Penambahan untuk honor moderator dan notulis serta transportasi pengambilan sampel.
- 2) Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.

30.298.200,-. Menjadi Rp. 30.598.200,-. Dalam anggaran perubahan bertambah sebesar Rp. 300.000,-. Penambahan untuk honor moderator , pembawa acara dan notulis

Rincian lengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP)
Kota Payakumbuh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPDP 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2																		
2																		
2	09																	
2	09	01																
2	09	01	2.01															
2	09	01	2.01	01														
2	09	01	2.01	07														
2	09	01	2.02															
2	09	01	2.02	01														
2	09	01	2.02	02														

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)
Kota Payakumbuh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 09 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	2,241,800	4,831,350	7,441,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	14 Laporan	3,941,800	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan kepegawaian	100 %		0 %	100 %	100 %	15,400,000	15,357,720	13,695,080						100 %	20,058,940	
2 09 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				22 Paket	22 Paket	15,400,000	15,357,720	13,695,080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	22 Paket	12,058,940	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Ketahanan Pangan	0 Dokumen	8,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum Sesuai Standar	85 %		0 %	85 %	85 %	152,478,820	162,515,500	199,388,500						85 %	222,117,670	
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	1,615,300	1,613,150	1,613,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	9 Paket	2,915,300	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	1 Paket	40,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Payakumbuh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				52 jenis	52 jenis	13,526,720	13,526,000	13,526,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	52 jenis	21,179,310	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8,857,600	8,862,150	8,139,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	4 Paket	8,950,860	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 media	2 media	8,392,200	8,392,200	8,392,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	2 media	8,592,200	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	3,425,000	3,425,000	1,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	5 Laporan	12,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	116,662,000	126,697,000	165,868,000	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	100 Laporan	128,480,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	85 %		0 %	85 %	85 %	45,250,000	39,228,600	67,582,600						85 %	375,000,000	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Payakumbuh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.09.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Payakumbuh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	0 Unit	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan				0 Paket	1 Paket	0	0	666,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	1 Paket	25,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	33,000,000	27,064,000	44,289,000	Kota Payakumbuh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	7 Unit	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	0 Unit	35,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	12,250,000	12,144,600	22,627,600	Kota Payakumbuh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	1 Unit	65,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Sesuai Standar	85 %		0 %	85 %	85 %	37,282,484	62,937,972	61,722,164						85 %	61,546,324	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Payakumbuh
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,494,500	1,494,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	1 Laporan	2,857,840	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	0 Laporan	1,124,000	1,122,280	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	0 Laporan	19,030,000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	34,658,484	60,321,192	60,227,664	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	1 Laporan	39,658,484	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasana kantor dalam kondisi baik	85 %	0 %		85 %	85 %	111,400,000	111,030,000	109,200,000						85 %	130,290,000	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39,190,000	39,190,000	39,190,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	1 Unit	39,190,000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	64,900,000	64,900,000	64,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	10 Unit	84,900,000	Dinas Ketahanan Pangan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Payakumbuh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 jenis	2 jenis	7,310,000	6,940,000	5,110,000	Kota Payakumbuh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	2 jenis	6,200,000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan yang tersedia (Masyarakat + Pemda)	54,00 %	0 %		51,00 %	51,00 %	10,000,000	10,000,000	10,000,000						51,00 %	5,000,000	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	18 %	0 %		15 %	15 %	10,000,000	10,000,000	10,000,000						15 %	5,000,000	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Payakumbuh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	0 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik				2 Kali	2 Kali	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Payakumbuh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	2 Kali	5,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE	58,50 % 62,50 %	0 % 0 %		57,00 % 61,00 %	57,00 % 61,00 %	178,338,026	433,069,114	398,333,652						57,00 % 61,00 %	926,950,452	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Payakumbuh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	1. Persentase Pengembangan Usaha Kelembagaan Distribusi Pangan 2. Persentase Informasi Harga yang Up to Date	19 % 100 %		0 % 0 %	16 % 100 %	16 % 100 %	26,838,026	52,333,264	70,944,902				16 % 100 %	102,000,000			
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				2 Laporan	2 Laporan	12,900,000	12,900,000	12,900,000	Kota Payakumbuh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	2 Laporan	35,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,438,026	32,933,364	51,545,002	Kota Payakumbuh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				2 Unit	2 Unit	6,000,000	5,999,900	5,999,900	Kota Payakumbuh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	2 Unit	12,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				5 Unit	5 Unit	500,000	500,000	500,000	Kota Payakumbuh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	5 Unit	25,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	66 %		0 %	63 %	63 %	500,000	122,499,900	79,667,400						63 %	73,589,686	
2 09 03 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				2 Kali	1 Kali	500,000	122,499,900	2,667,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	1 Kali	23,453,750	Dinas Ketahanan Pangan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Payakumbuh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diadakan				0 Ton	7 Ton	0	0	77,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	7 Ton	50,135,936	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Diversifikasi Konsumsi Pangan 2. Persentase Masyarakat yang telah Terampil dalam Mengolah Pangan Lokal Non Beras Non Terigu	45 % 23 %		0 % 0 %	42 % 20 %	42 % 20 %	151,000,000	258,235,950	247,721,350						42 % 20 %	751,360,766	
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Jumlah Dokumen Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	4,124,950	4,124,850	4,124,850	Kota Payakumbuh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	1 Dokumen	20,624,950	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	110,000,000	181,242,450	182,442,450	Kota Payakumbuh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	1 Laporan	659,029,098	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.04 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	36,875,050	72,868,650	61,154,050	Kota Payakumbuh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	1 Laporan	71,706,718	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor PPH ketersediaan	89,30 skor		0 skor	89,00 skor	89,00 skor	89,500,000	89,499,740	79,183,240						89,00 skor	169,206,645	
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait	50 %		0 %	50 %	50 %	15,000,000	14,999,900	15,166,400						50 %	80,000,750	
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	14,999,900	15,166,400	Kota Payakumbuh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	1 Dokumen	80,000,750	Dinas Ketahanan Pangan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Payakumbuh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APSD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Hasil Pemanfaatan Pekarangan	20 %		0 %	17 %	17 %	74,500,000	74,499,840	64,016,840				17 %	89,205,895			
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	19,500,000	19,499,940	9,016,940	Kota Payakumbuh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	2 Laporan	4,205,895	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	54,999,900	54,999,900	Kota Payakumbuh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	1 Dokumen	85,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	90,00 %		0 %	90,00 %	90,00 %	50,000,000	78,897,950	79,785,650						90,00 %	37,639,234	
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang Memahami Zat Berbahaya bagi Pangan	20 %		0 %	17 %	17 %	50,000,000	78,897,950	79,785,650						17 %	37,639,234	
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	48,599,750	49,187,450	Kota Payakumbuh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	1 Dokumen	27,476,894	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 05 2.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	30,298,200	30,598,200	Kota Payakumbuh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	1 Dokumen	10,162,340	Dinas Ketahanan Pangan
TOTAL								2,987,869,926	3,302,223,432	3,195,675,284							4,210,799,673	

IV. PENUTUP

Secara umum isi Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kerja dan kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023-2026 dan RKPD Perubahan Kota Payakumbuh Tahun 2023.

Kinerja yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan pembangunan ketahanan pangan sampai saat ini harus dapat terus ditingkatkan untuk kegiatan tahun berikutnya, sejalan dengan makin mantapnya pemahaman tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan serta seiring dengan budaya kerja profesional yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas dan kualitas hasil kerja.

Menyadari bahwa kemampuan sumber daya yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan sangat terbatas terutama kuantitas personil, maka guna mewujudkan agar tercapainya sasaran pembangunan ketahanan pangan sangat diperlukan dukungan berbagai pihak terutama stake holder terkait baik pemerintah maupun swasta, dan yang tidak kalah penting adalah adanya peran serta aktif dari masyarakat.

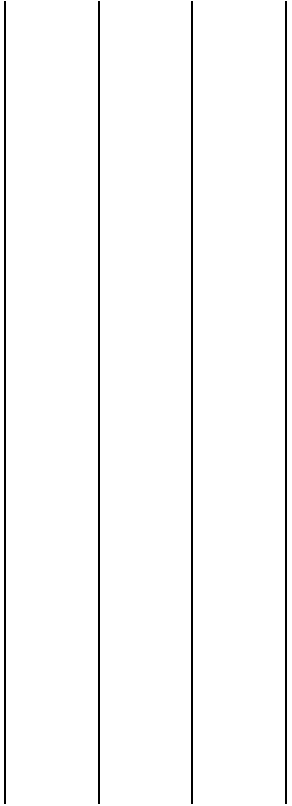
Payakumbuh, Agustus 2023
KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH

EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	78.897.950	79.785.650	79.785.650									
					Kegiatan	78.897.950	79.785.650	79.785.650									
2	09	05	2.01		Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota												
					Sub Kegiatan												
2	09	05	2.01	01	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	48.599.750	49.187.450	49.187.450									
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	30.298.200	30.598.200	30.598.200									

Payakumbuh, Agustus 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001



--	--	--	--

DKP